

**BAB I**  
**ARTIKEL I**  
**Islam Pasca Perang Shiffin:**  
**Sejarah Politik Kenegaraan Islam Era Sahabat**  
Muhsin Hariyanto, Zuly Qodir and Hase Juba

**ABSTRAK**

*Politik adalah sumber terbesar perpecahan umat Islam. Berawal dari perselisihan yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib dan Mu'awiyah, dalam pandangan sebagian ulama, ingin melakukan balas dendam atas kematian Utsman. Pecahnya perang Shiffin merupakan babak baru dalam sejarah lahirnya sekte-sekte yang memiliki visi politik masing-masing. Article ini bertujuan menjawab pertanyaan, mengapa kelahiran dua mazhab memunculkan perpecahan yang terus berlangsung hingga saat ini dalam Islam dan adakah perannya dalam memengaruhi pemikiran politik umat Islam sampai saat ini. Dalam artikel ini menemukan bahwa adanya perang Shiffin menyebabkan lahirnya mazhab atau sekte dalam islam yang saling bertengkar baik secara politik maupun teologis. Munculnya Mazhab Estrem Khawarij kemudian menjadikan adanya mazhab Murjiah yang beraliran moderat. Namun pada perkembangannya, baik Khawarij, Syiah dan Murjiah memunculkan perkembangan pemikiran kenegaraan dalam Islam yang saling berbeda antara satu dengan lainnya. Pendekatan dalam kajian ini adalah Sejarah politik dengan perspektif kritis sehingga memungkinkan adanya perbedaan tafsir atas peristiwa Sejarah Umat Islam era Sahabat hingga saat ini. Metode dalam kajian ini adalah kajian literatur atas naskah-naskah yang sesuai dengan topik kajian yakni perang shiffin.*

*Kata kunci: Perang Shiffin, Politik Islam, Mazhab, Sahabat.*

## Pendahuluan

Perkembangan pemikiran politik kenegaraan dalam Islam merupakan mata rantai khazanah pemikiran muslim. Demikian komentar Al-Mas'udi, sebagaimana dikutip oleh Majid Fakhry. (Fakhry,1970: 52) Hubungan tersebut bisa dilihat sebagai sebuah hubungan kausal atau bahkan resiprokal. Hubungan kausal, misalnya bisa kita lihat pada kasus pemikiran politik dengan pemikiriran sejenis. Sedangkan hubungan resiprokal, misalnya bisa kita simak dari pemikiran politis dengan pemikiran teologis. (Watt, 1987: 203-209)

Perkembangan pemikiran yang terjadi pada masa pasca Perang Shiffin (37/657) pun harus kita lihat sebagai sebuah fenomena-terikat, artinya peristiwa itu bukanlah merupakan fenomena tunggal yang terlepas dari kerangka peristiwa lain. Penulis melihat, bahwa pemikiran politik kenegaraan umat Islam yang pada saat itu adalah implikasi dari peristiwa besar Perang Shiffin yang terjadi sebelumnya dan merupakan mata rantai dari pemikiran politik kenegaraan yang telah ada sebelumnya. Kontribusi kelompok yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam Perang Shiffin sangat besar terhadap perkembangan pemikiran tersebut. Bahkan secara transparan, bisa disebut bahwa kelompok-kelompok itulah yang kemudian menggulirkan beberapa pemikiran politik kenegaraan, baik yang bercorak apologetik maupun religio-politik objektif. (Ma'arif, 1987: ix-xiii; Madjid, 1987: ix-xii)

Tulisan ini bertujuan sebagai kajian awal perkembangan pemikiran politik kenegaraan dalam Islam yang kita lihat sebagai *dependent variable* dari *independent-variable*-nya: "Perang Shiffin" dengan bertumpu pada kajian Muhammad Abu Zahrah dalam bukunya yang berjudul: *Târikh al-Madzâhib al-Islâmiyah fi al-siyâsah wa al-'Aqâ'id* dan W. Montgomery Watt dalam bukunya yang berjudul : *Islamic Political Thought*. Dalam hal ini, penulis menggunakan metode penulisan sejarah kritis, dengan berupaya secara cermat mengembangkan kajian analitiko-deskriptif-komparatif. (Vredenberg, 1980: 34-39; Muhadjir, 1991: 29-48)

Sebagai sebuah karya penelitian sejarah, penulis melakukan reinterpretasi terhadap peristiwa perang Shiffin, berikut latar belakang dan implikasinya. Pendekatan dalam artikel ini merupakan pendekatan kritis atas data sejarah yang penulis peroleh sehingga menjadi bahan kajian yang memiliki kebaruan, yang tentu saja bukan sekadar kebaruan data, tetapi juga kebaruan interpretasi kritisisme sejarah.

Berpijak dari telaah kritis tersebut, seperti pernyataan Mutahhari, 1986: 65-67), diharapkan bisa membebaskan diri penulis dari pengetahuan sejarah konvensional menuju pengetahuan sejarah rasional dan kontekstual, atau dari sejarah naratif menuju sejarah kritis, hal ini karena: (1) sejarah Islam merupakan pengetahuan masa lampau dan berkaitan dengan keadaan-keadaan masa kini dan selanjutnya; (2) pengetahuan mengenai ide-ide yang melatarbelakangi berbagai aspek kehidupan umat Islam itu diperoleh melalui penelitian dan analisis atas peristiwa-peristiwa masa lampau; (3) sejarah Islam merupakan fakta-fakta yang didasarkan kepada pengetahuan tentang perubahan-perubahan masyarakat muslim, yang oleh karenanya, cukup beralasan jika sejarah Islam dikembangkan menjadi bidang yang lebih komprehensif, yang terkait dengan persoalan sosial-budaya dan ekonomi, politik dan juga sosial-keagamaan, (Abdurrahman, 2019: 56-57)

Ahmad Syafii Maarif pun menyatakan: “Proses untuk memahami dalam kajian sejarah harus dibarengi pula dengan pendekatan dan metodologi yang memadai, karena jika tidak demikian wajah sejarah tidak lagi indah untuk dinikmati, bahkan bisa terlihat garang, karena sangat mungkin akan diperas untuk kepentingan sebuah kelompok tertentu. Untuk itu, katanya, menempatkan sejarah sebagai ruang bersih, objektif dan bebas kepentingan harus dilalui dengan pendekatan, metodologi ilmiah, sehingga kebenarannya dapat dipertanggung-jawabkan.” (Karim, 2015: 7)

## **Metode Penelitian**

Tulisan ini diupayakan untuk menghasilkan kajian sejarah kritis mengenai perang Shiffin, baik dari latar belakangnya, proses dan dampaknya. Dengan bahan utama dari buku-buku Sejarah Islam, yang utamanya membahas tentang perang Shiffin.

Buku utamanya adalah tulisan yang dihimpun oleh Muhammad Abu Zahrah (), W. Montgomery Watt (*Islamic Theology and Philosophy*), Ath-Thabari (*Târîkh al-Umam wa al-Muluk*), Muhammad Amhazun (*Tahqîq Mawâqif ash-Shahâbah Fî al-Fitnah*) dan M.A. Shaban (*Islamic History, A.D. 600-7500 (A.H.132): A New Interpretation*). Sedang untuk kepentingan analisisnya, penulis menyertakan beberapa buku pendukungnya, utamanya tulisan Nourouzzaman Shiddiqi (*Syiah dan Khawarij dalam Perspektif Sejarah; Pengantar Sejarah Muslim; Syi'ah dan Khawarij Dalam Perspektif Sejarah* Yogyakarta: PLP2M dan *Tamaddun Muslim*), Suyuthi Pulungan (*Fiqh Siyasa Ajaran, Sejarah dan Pemikiran dan Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Quran*), serta Munawir Sjadzali (*Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*).

Dengan menggunakan penalaran kritis-kualitatif, penulis mendeskripsikan dan menganalisis data sejarah tentang perang Shiffin berikut latar belakang dan dampaknya, peran tokoh-tokohnya, dan implikasi dari hasil penelitian yang diharapkan bisa menjadi 'ibrah, utamanya bagi kepentingan umat Islam untuk merajut kembali ukhuwah yang pernah hilang karena konflik panjang berkaitan dengan peristiwa perseteruan antar umat Islam yang cukup melelahkan.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Latar Belakang Perang Shiffin**

Sepeninggal Rasulullah saw, umat Islam bertanya: "siapakah pengganti beliau? Seberapa jauhkah kedudukan pengganti beliau sebagai

pemimpin? Otoritas apakah yang dipunyai oleh para pengganti beliau?" Tiga pertanyaan mendasar inilah yang nampaknya akan dijawab oleh Muhammad Abu Zahrah dan W. Montgomery Watt dalam tesis mereka.

Abu Zahrah berpendapat bahwa pertanyaan-pertanyaan tersebut haruslah dilihat dalam konteks perbedaan pandangan umat Islam tentang *ishtikhâlâf*. Karena pandangan umat Islam terhadap persoalan ini cukup beragam. Pada masa pemerintahan Abu Bakar, pandangan umat Islam masih terpilah dalam dua kelompok besar, yaitu: kelompok pendukung kekhalifahan dan penentangannya. Meskipun kalau kita telusuri dengan cermat kedua kelompok tersebut memiliki beberapa perbedaan pandangan dalam upaya menjawab ketiga pertanyaan diatas. Tetapi, dilihat sebagai model pemikiran, kategorisasi tersebut tidak berarti salah. Abu Zahrah memandang bahwa di dalam pemikiran mereka, sebenarnya hanya terdapat dua cara pandang. Pertama: khilafah adalah persoalan *ijtihâdiyyah*. Pandangan ini diwakili oleh mayoritas umat Islam pada masa saat itu, yang kemudian kita kenal sebagai kelompok non-Syi'ah. Kedua: khilafah adalah persoalan *wishâyah*. Pandangan ini diwakili oleh kelompok pendukung Ali bin Abi Thalib, meskipun tidak seluruhnya berpandangan sama, yang kemudian dikenal dengan kelompok Syi'ah.

Kedua pandangan ini, menurut Muhammad Abu Zahrah, berkembang hingga masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib sebelum terjadinya *Tahkîm* pada saat Perang Shiffin. Lebih lanjut, Muhammad Abu Zahrah merinci pernyataannya menjadi empat pertanyaan: Pertama: Apakah boleh ada dua khalifah? Kedua: Apakah khalifah harus seorang suku Quraisy? Ketiga: Bolehkah khalifah berbuat maksiat atau tidak sama sekali? Keempat: Haruskah seorang khalifah berlokasi di lingkungan kaum Quraisy atau boleh dimana saja? (Zahrah, tth: 29-48)

Pertanyaan-pertanyaan tersebut menurut pendapat penulis merupakan pertanyaan lanjut berkaitan dengan perselisihan-perselisihan pendapat umat Islam pada masa-masa berikutnya. Sebagaimana analisis W. Montgomery Watt Watt, khilafah adalah

terminologi Sunni yang mempunyai konotasi politik. Bagi kaum Sunni khalifah bukanlah pemilik otoritas moral, tetapi seorang yang secara politik berhak memerintah, atau dalam istilah politik adalah pemegang kekuasaan eksekutif. Sementara itu, orang-orang Syi'ah lebih senang menggunakan istilah Imamah bagi kekhalifahan Islam yang dikenal oleh orang-orang Sunni. Istilah ini memiliki konotasi politik dan teologi. Imam, sebagai pemimpin negara, memiliki otoritas moral dan otoritas politik. (Watt, 1987: 32-36: Cf. El Wa, 1983: 48-89) Untuk itu, penjelasan terhadap beberapa pertanyaan Muhammad Abu Zahrah tersebut di atas, menurut pendapat penulis, haruslah dikaitkan dengan perkembangan pemikiran politik kenegaraan pada masa sesudah kekhalifahan *Al-Khulafâ' al-Râsyidûn*, utamanya setelah terjadinya pembunuhan terhadap Utsman, yang dilanjutkan dengan peristiwa perang saudara (antarumat Islam), (1) perang Jamal, Perang Shiffin dan (juga) perang Nahrawan. Dan lebih khusus lagi setelah usai perang Shiffin. (Aizid, 2021: 236-244)

Harus diakui, bahwa sejak masa pemerintahan Utsman bin Affan, kekompakan umat Islam lambat laun retak dan keserasian hubungan antara khalifah dan rakyatnya mulai terganggu. Hal itu, kata para sejarawan, terutama disebabkan oleh kepemimpinan yang dianggap lemah, bahkan ada isu nepotisme yang berkembang di tengah masyarakat. Kekacauan memuncak dengan adanya pemberontakan yang berakhir dengan terbunuhnya Utsman bin Affan, dalam sejarah Islam dikenal dengan istilah al-Fitnah al-Kubra. Kemudian dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib, yang ternyata belum bisa meredam gejolak, bahkan memunculkan perseteruan dengan 'Aisyah, Zubair bin Awwam dan Thalhah bin Ubaidillah dengan alasan permintaan pertanggungjawaban atas kematian Utsman bin Affan. Kemudian terjadilah perang saudara yang dikenal dengan sebutan Perang Jamal, yang pada akhirnya dimenangkan oleh pihak Ali bin Abi Thalib, dengan menyisakan luka karena terbunuhnya Zubair bin Awwam dan Thalhah bin Ubaidillah. Sementara itu, 'Aisyah, atas permintaan Ali bin Abi Thalib, diselamatkan dan dibawa Kembali ke Madinah. (Sjadzali, 1990: 32).

Seusai perang Jamal, terjadilah perang saudara yang lebih besar, yaitu Perang Shiffin, antara Ali dan Pendukungnya melawan Mu'awiyah bin Abi Sufyan dan para pendukungnya yang berakhir dengan kekalahan pihak Ali di meja perundingan (Tahkim), yang mengakibatkan terpecahnya umat Islam menjadi 3 (tiga) kubu: (1) Kubu Ali bin Abi Thalib; (2) Kubu Mu'awiyah bin Abi Sufyan dan (3) Khawarij yang tidak bersedia untuk mendukung Ali bin Abi Thalib maupun Muawiyah bin Abi Sufyan, hingga mengakibatkan terjadinya perang Nahrawan (antara Kubu Ali bin Abi Thalib dan Khawarij) yang dimenangkan oleh pihak Ali bin Abi Thalib, tetapi berujung pada terbunuhnya Ali oleh Abdurrahman bin Muljam (dari kelompok Khawarij) pada tahun kelima kekhalfahan Ali bin Abi Thalib. (Ibid: 32-33)

Perkembangan lanjut dari pemikiran politik kenegaraan, sebenarnya dimulai dari munculnya Dinasti Umayyah. Hal ini bisa dipahami dalam kerangka sejarah perkembangan kekhalfahan dalam Islam. M.A. Shaban, misalnya, melihat Perang Shiffin dengan peristiwa *Tahkîm* menjadi kekuatan pemicu bagi munculnya pemikiran (baru) politik kenegaraan. Ia berpendapat bahwa Perang Shiffin dengan peristiwa Tahkîmnya, bukanlah kejadian yang sederhana. Ada muatan politik yang selama ini belum layak diungkap oleh para sejarawan baik muslim maupun non-muslim. Menurut pendapatnya, konfrontasi Shiffin yang tampak di permukaan terjadi seolah-olah adalah peperangan sesama Muslim, bukanlah merupakan peperangan yang dikehendaki oleh kedua belah pihak. Di dalamnya, menurut pendapatnya ada pihak-pihak tertentu yang berkepentingan baik secara pribadi maupun kelompok. Hal ini terlihat, bahwa Perang Shiffin adalah sebuah alasan untuk melakukan perundingan yang dirancang oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam konteks itu, dapat dilihat beberapa figur penentu dalam peristiwa tersebut, misalnya: Al-Asy'ats bin Qais, seorang mantan panglima perang *riddah* yang pernah diperangi oleh Abu Bakar pada masa kekhalfahannya yang memiliki kelompok besar dalam pasukan Ali bin Abi Thalib.

Sesungguhnya, menurut pengamatan M.A. Shaban, dialah orang yang paling berperan mengatur jalannya peperangan dan perundingan di pihak Ali bin Abi Thalib, sementara Ali bin Abi Thalib sendiri tidak mampu mengendalikan rekayasannya sampai pasukannya harus menyerah untuk menerima kenyataan pahit “kekalahan di meja perundingan”. Bahkan, menurut pendapat Shaban, dialah (Asy’ats bin Qais) yang mengatur segala sesuatunya berkaitan dengan perundingan tersebut, hingga pada soal penunjukkan Abu Musa al-Asy’arial-Asy’ari sebagai wakil kelompok Ali di meja perundingan, sebab sesungguhnya Ali bin Abi Thalib sendiri menghendaki Abdullah bin ‘Abbas sebagai wakilnya. (Shaban, 1993: 107-112)

Tak lama setelah merebut kekuasaan, Ali memberhentikan sebagian besar gubernur yang dianggapnya korup, termasuk Mu'awiyah, sepupu Utsman. Mu'awiyah menolak untuk mundur dan memberi tahu Ali melalui perwakilan bahwa dia akan mengakui Ali sebagai khalifah dengan imbalan jabatan gubernur Suriah dan Mesir seumur hidup. Namun Ali bin Abi Thalib menolak proposal ini

Sebagai tanggapan, Mu'awiyah menyatakan perang terhadap Ali atas nama Suriah, menuntut pembalasan atas kematian Utsman. Gubernur bertujuan untuk menggulingkan Ali dan membentuk dewan Suriah untuk menunjuk khalifah berikutnya, yang mungkin adalah Mu'awiyah sendiri. Ali menjawab melalui surat bahwa Mu'awiyah dipersilakan untuk membawa kasusnya ke pengadilan Ali, memintanya untuk memberikan bukti yang akan memberatkan Ali dalam pembunuhan Utsman. Ali juga menantang Mu'awiyah untuk menyebutkan orang Suriah yang memenuhi syarat untuk dewan.

Ali bin Abi Thalib kemudian memanggil dewan elit penguasa Islam yang mendesaknya untuk melawan Mu'awiyah. Kedua pasukan itu bertemu di Shiffin, sebelah barat Efrat, pada tahun 657 M. Di sana, kedua belah pihak bernegosiasi selama berminggu-minggu. Khususnya, Mu'awiyah mengulangi usulnya untuk mengakui Ali dengan imbalan Suriah dan Mesir, yang kembali ditolak. Pada gilirannya, Ali menantang Mu'awiyah untuk duel satu lawan satu untuk menyelesaikan



masalah dan menghindari pertumpahan darah. Tawaran ini ditolak oleh Mu'awiyah. Negosiasi berhenti tanpa hasil pada tanggal 18 Juli 657 dan kedua belah pihak bersiap untuk pertempuran. Pertempuran dimulai pada Rabu, 26 Juli, dan berlangsung selama tiga atau empat hari. Pada hari terakhir, keseimbangan telah berubah menguntungkan Ali. Ketika Mu'awiyah diberi tahu bahwa pasukannya tidak bisa menang, dia memutuskan untuk mengajukan banding ke Al-Qur'an. Sebelum tengah hari, orang-orang Suriah mengangkat salinan buku itu dengan tombak mereka, berteriak, "Biarkan buku Tuhan menjadi hakim di antara kita." Meskipun Ali curiga dengan seruan ini, pasukannya berhenti berperang. Didorong oleh sentimen perdamaian yang kuat di pasukannya dan ancaman pemberontakan, Ali menerima proposal arbitrase. (Buchori, 2009: 44-45; Madelung, 1997: 238, 241)

Mayoritas tentara Ali mendesak Abu Musa al-Asy'arial-Asy'ari yang dilaporkan netral sebagai wakil mereka. Ali menganggap Abu Musa al-Asy'arinaif secara politik, tetapi mengangkatnya meskipun ada keberatan. Dalam sebuah perjanjian pada tanggal 2 Agustus 657 M, Abu Musa al-Asy'arial-Asy'ari mewakili pasukan Ali bin Abi Thalib sedangkan jenderal tertinggi Mu'awiyah, Amr bin al-'Ash, mewakili pihak lain. (Madelung, 1997: 241-243) Kedua perwakilan tersebut berkomitmen untuk mematuhi Al-Qur'an dan Sunnah, serta menyelamatkan komunitas Muslim dari perang dan perpecahan.

Kedua arbiter bertemu bersama, pertama di Dumat al-Jandal dan kemudian di Udhruh, dan prosesnya kemungkinan besar berlangsung hingga pertengahan April 658 M. Di Dumat al-Jandal, para arbiter mencapai keputusan bahwa Utsman telah dibunuh secara tidak wajar dan bahwa Mu'awiyah berhak membalas dendam. Menurut cendekiawan Wilferd Madelung, putusan ini bersifat politis daripada yudisial, dan merupakan kesalahan besar dari Abu Musa al-Asy'ari yang naif. Putusan ini memperkuat dukungan Suriah untuk Mu'awiyah dan melemahkan posisi Ali.

Pertemuan kedua di Udhruh kemungkinan besar bubar karena Amr melanggar perjanjian sebelumnya dengan Abu Musa al-Asy'ari. Delegasi Kufah bereaksi dengan marah atas konsesi Abu Musa al-Asy'ari, dan mantan arbiter melarikan diri ke Mekah dengan aib. Sebaliknya, Amr diterima dengan penuh kemenangan oleh Mu'awiyah sekembalinya ke Suriah. Setelah penyelesaian arbitrase pada tahun 659 M, orang-orang Suriah berjanji setia kepada Mu'awiyah sebagai khalifah berikutnya. Ali mencela perilaku kedua arbiter itu bertentangan dengan Al-Qur'an dan mulai mengatur ekspedisi baru ke Suriah. (Buchori, 2009: 46-47; Madelung, 1997: 257)

Apabila kepercayaan yang berlawanan mengenai nilai-nilai tertinggi (*ultimate value*) masuk ke dalam arena politik, mereka mulai bertikai dan mungkin jauh dari kompromi (Robertson, 1988: 49) Dari teori ini dapat dipahami bahwa apabila kepentingan-kepentingan yang berlawanan dari individu atau kelompok ditarik karena politik, maka pertikaian akan muncul ke permukaan, yang pada gilirannya akan melahirkan konflik.

Konflik adalah perilaku manusia, yang bukan hanya timbul pada kehidupan kelompok saja sering terjadi, bahkan dalam kehidupan keluarga pun tak dapat dielakkan, suatu saat akan muncul. Kalau konflik itu masih dapat diatasi, berarti ia masih dalam batas-batas kewajaran dan itu logis. Namun, yang menjadi masalah apabila konflik sudah lepas control dan tidak dapat dikendalikan, maka akibatnya akan lahir suatu pertikaian terbuka atau peperangan. Di antaranya adalah peristiwa yang dialami oleh Khalifah Ali bin Abu Thalib, ketika baru menduduki tahta kekhalifahan keempat. Terjadi dua konflik terbuka silih berganti, yaitu Perang Jamal dan Perang Shiffin. Sedangkan perang yang kedua terjadi ini dicoba mencari gormulasi dan jalan keluar pemecahannya dengan mengajukan konsep at-Tahkîm. Namun At-Tahkîm ini para sejarawan menilai formulasi yang tidak berhasil, disebabkan dari hasil at-Tahkîm ini tidak diterima secara bulat oleh dua kelompok yang bertikai, bahkan melahirkan dua front masyarakat yang

pro dan kontra, yang sekaligus merupakan embrio dari berbagai macam sekte-sekte keagamaan yang lahir kemudian.

### **Tahkim dalam Gejolak Politik Islam**

Bertitik-tolak dari hal tersebut di atas, penelitian ini akan membahas At-Thkim; Sebuah Tinjauan Historis dengan metode reflektif-historis yang bersifat deskriptif-analitis. (Shiddiqi, 1983: 18.) Dengan tidak mengabaikan pendekatan sosiologis-politis. Dengan makalah ini diupayakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sekitar at-Tahkîm, mengapa terjadi at-Tahkîm? Dari pihak mana ide itu muncul? Bagaimana proses terjadinya at-Tahkîm, Dimana letak perselisihan mereka dan bagaimana dampak pasca *Tahkîm*.

Dialog antara pihak Ali bin Abi Thalib yang diwakili oleh Abu Musa al-Asy'arial-Asy'ari dengan pihak Mu'awiyah bin Abi Sufyan yang diwakili oleh Amru bin 'Ash dalam Tahkîm.

Dari perundingan itu, telah diambil suatu ketetapan bahwa Utsman bin Affan telah mati teraniaya, dan wali dari orang yang mati teraniaya berhak menuntut balas. Dan Mu'awiyah adalah orang yang paling berhak menuntut balas atas kematian Utsman tersebut.

Kemudian perundingan beralih ke sekitar masalah pengusulan penurunan Ali dan Mu'awiyah dari jabatan masing-masing. Setelah itu, jabatan khalifah diserahkan kepada kaum muslimin untuk memilih siapa yang mereka inginkan. Ide ini dikemukakan oleh Abu Musa al-Asy'arial-Asy'ari dan disetujui oleh Amru bin 'Ash. Dan pertemuan pun dilanjutkan pada keesokan harinya.

Setelah Abu Musa al-Asy'arial-Asy'ari kembali ke fraksinya dan menyampaikan hasil perundingan tersebut, Abdullah bin Abbas memeringatkannya akan kelicikan Amru bin 'Ash, serta memberikan saran kepadanya agar berbicara terlebih dahulu. Akan tetapi Amr bin al-'Ash tidak kurang akal. Ia tidak mau maju terlebih dahulu, dengan alasan Abu Musa al-Asy'arial-'Asy'ari itu lebih tua darinya, lebih

dahulu berhijrah dan lebih dahulu masuk Islam. Ia ingin menghormatinya (Abu Musa al-Asy'arial-'Asy'ari).

Maka Abu Musa al-Asy'arial-Asy'ari pun tampil lebih dahulu ke hadapan kaum muslimin, mengumumkan hasil perundingan serta menyatakan bahwa Dia telah sepakat untuk menurunkan Ali bin Abi Thalib dari jabatannya. Setelah itu, Amr bin al-'Ash pun berdiri dan menyatakan, bawa Dia pun setuju dengan pernyataan Abu Musa al-Asy'arial-Asy'ari yang menyatakan pemberhentian Ali bin Abi Thalib, lalu Dia mengumumkan pula, karena Ali bin Abi Thalib telah diberhentikan, Dia pun menyatakan untuk menetapkan Mu'awiyah sebagai Khalifah. (Syalabi, 1987: 304)

Para sejarawan memandang, bahwa hasil *Tahkîm* Shiffin bukanlah sebagai jalan penyelesaian terbaik atau ideal bagi umat Islam. Karena, ternyata hasilnya tidak cukup signifikan untuk kepentingan ishlâh, utamanya terkait dengan kepentingan untuk memperbaiki persaudaraan umat Islam yang tengah rusak sebagai akibat dari konflik internal mereka., Bahkan ditengarai, hasil tahkim itu hanya memuaskan pihak Mu'awiyah dan para pendukungnya, sementara pihak Ali dan pendukungnya banyak dirugikan, dan telah menumbulkan perpecahan di kalangan para pendukung Ali. Kelompok yang setia terhadap kepemimpinan Ali bin Abi Thalib semakin solid, dan kemudian meunculkan kelompok baru yang disebut oleh para sejarawan dengan sebutan Syi'ah Ali, dan kelompok penentangannya bersepakat untuk meninggalkan Ali bin Abi Thalib, karena Ali bin Abi Thalib dianggap telah menyimpang dari hukum Allah, karena menyetujui hasil Tahkîm, yang menurut mereka cacat aqidah dan moral. Mereka, selanjutnya dikenal oleh para sejarawan dengan sebutan Khawarij, Bahkan Ahlul Qurra', sebuah istilah yang oleh para sejarawan dikenal sebagai kelompok ulama al-Quran, melakukan protes atas hasil *Tahkîm* yang dipandaang sangat merugikan pihak Ali, dengan mengemukakan adagiaum: "*Lâ hukma illâ lillâh*" (tidak ada hukum kecuali milik Allah), yang kemudian dalam sejarah peradaban Islam dikenal sebagai Doktrin Khawarij. Mereka, yang merasa mewakili kelompok umat Islam yang bersikapo konsisten dalam memegang hukum Allah,

menuntut agar agar Ali bin Abi Thalib menolah hasil perundingan (*Tahkîm*) itu. Tetapi, Ali bin Abi Thalib menolak permintaan mereka, yang tidak mereka ketahui alasannya, karena Ali bin Thalib tidak pernah memberikan penjelasan kepada mereka. (Shiddiqi, 1985: 38).

Dari pembahasan ini, dapat disimpulkan bahwa Tahkîm yang dimaksudkan sebagai upaya perdamaian tidak memenuhi kualifikasi sebagai keputusan yang dihapkan oleh umat Islam yang sedang bertikai. Bahkan, justeru menimbulkan perpecahan baru. Karena, hasil *Tahkîm* dipandang sebagai sesuatu yang menguntungkan salah satu pihak (Mu'awiyah dan para pendukungnya), dan sebaliknya merugikan pihak lain (Ali dan para pendukungnya).

Terlepas dari hasil yang telah dirumuskan, umat Islam justeru terpecah menjadi 3 kelompok besar: (1) Para Pendukung Mu'awiyah, yang kemudian dikenal dengan sebutan Sunni; (2) Para pendukung setia Ali bin Abi Thalib, yang kemudian dikenal dengan sebutan Syiah; dan (3) Kelompok penentang Mu'awiyah dan Ali, yang kemudian dikenal dengan sebutan Khawarij.

Perpecahan ini tidak saja menciptakan konflik internal yang bertumpu pada kepentingan politik. Tetapi, juga bertumpu pada kepentingan aqidah. Sehingga perpecahan antarumat Islam, sebahagi akibat dari perang Shiffin yang berakhir dengan *Tahkîm* pun semakin sulit untuk dihindari.

Peristiwa Tahkîm, sebagaimana penjelasan di atas, dapat dikatakan sebagai sebab penentu (pemicu) bagi perkembangan lanjut pemikiran politik Islam pasca *Al-Khulafâ' al-Râsyidûn*. Pertama, bisa dilihat dari kekalahan diplomatik Ali bin Abi Thalib atas Mu'awiyah yang kemudian munculnya kelompok pendukung Ali bin Abi Thalib yang memiliki kerangka pikir politis yang mengarah pada pelestarian dan pengembangan pemikiran doktrin imamah. Kedua, kemenangan diplomatik Mu'awiyah yang kemudian memunculkan pemikiran yang seolah-olah berciri kekhalifahan sebagaimana pemikiran kaum non-Syi'ah semasa pemerintahan *Al-Khulafâ' al-Râsyidûn*. Ketiga,

(peristiwa Tahkîm) memunculkan ketidakpuasan sebagian kelompok Ali bin Abi Thalib dari kelompok Ahlul Qurra', yang kemudian berlanjut dengan munculnya kelompok pemikiran Khawarij dengan doktrin dasarnya: "*La hukma illâ lillâh.*" (Zahrah, 1984: 245-256).

## **Kesimpulan**

Perang Shiffin memberikan pelajaran yang sangat berharga, utamanya bagi umat Islam. Hal ini karena, ternyata perseteruan politik antarumat Islam terbukti telah memberikan sumbangan terbesar bagi keruntuhan persaudaraan antarumat Islam. Berawal dari perselisihan yang terjadi pada *Al-Fitnah al-Kubra* pada masa pemerintahan Utsman bin Affan yang berakhir pada peristiwa terbunuhnya Utsman bin Affan, dilanjutkan dengan perang saudara antarumat Islam yang memuncak pada pecahnya perang Shiffin merupakan peristiwa sejarah yang pada akhirnya melahirkan beragam firqah, dengan visi politik masing-masing.

Sebagai implikasi perang, muncullah kelompok Syi'ah dan Khawarij. Dua kelompok muncul karena faktor yang sama, yaitu ekstremitas dan kontradiksi. Munculnya Khawarij memberikan andil yang besar dalam kemunculan dan sekaligus penyebaran Syiah. Bahkan pertarungan kedua firqah tersebut memunculkan firqah lain yang bertujuan untuk menengahi antara dua kubu yang kontradiktif, yaitu: Murji'ah, sebuah firqah yang berani memunculkan visinya sendiri, meskipun pada akhirnya menjadi sintesis antara dua firqah yang lain, dengan melahirkan kelompok Sunni.

Kelompok-kelompok tersebut tidak hanya melahirkan pemahaman teologi, tetapi sekaligus melahirkan beragam pemikiran politik kenegaraan dalam Islam, yang pada akhirnya juga memunculkan perpecahan di kalangan umat Islam yang hingga saat ini terpecah menjadi tiga kelompok besar: Syi'ah, Sunni dan Khawarij.

## Daftar Pustaka

- Abdurrahman, Dudung. (2019) *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*. Yogyakarta; Ombak.
- Aceh, Abu Bakar. (1984). *Syi'ah: Rasionalisme Dalam Islam*, Solo: Ramadhani.
- Aizid, Rizem. (2021). *Sejarah Peradaban Islam Terlengkap*. Yogyakarta: DIVA Press.
- Amahzun, Muhammad. (2011). *Tahqîq Mawâqif ash-Shahâbah Fî al-Fitnah*, Qâhirah: Dâr as-Salâm.
- Amili, Muhsin. (t.th.). *A'yân al-Syi'ah, Juz I*, Beirut: Dâr al-Ta'âruf.
- Amin, Ahmad. (t.th.). *Fajr al-Islâm*, Kairo: Maktabah al-Nahdhah al-Misriyyah.
- Arabi, Al-Imam al-Qadhi Abu Bakar Ibnul. (2016). *Meluruskan Sejarah Menguak Tabir Fitnah*. Jakarta: Darul Haq.
- Asqalani, Ahmad bin Ali Ibnu Hajar al-. (1995) *Al-Ishabah fî Tamyiz al-Shahabah*. Riset Adil Ahmad Abdulmaujud dan Ali Muhammad Muawwadh. Dâr -Kutub al-Ilmiyah.
- Atsir, Ali bin Muhammad Ibnu. (1989) *Usd al-Ghâbah Fî Ma'rifah al-Shahâbah*. Beirut: Dâr al-Fikr.
- Baghdadi, Muhammad bin Habib al-. (t.th.) *Al-Muhabbar*. Beirut: Dâr al-Afaq al-Jadidah.
- Baghdadi, Muhammad bin Habib al-. (t.th.). *Al-Farq Bain al-Firaq*. Beirut: Dâr al-Ma'rifah.

- Bahramiyan, Ali. (1379 H.) *Asy'ats bin Qais Kindi*. Dairat al-Maarif Buzurje Eslami. Teheran.
- Buchori, Didin Saefuddin. (2009). *Sejarah Politik Islam*. Jakarta: Pustaka Intermedia.
- Bukhari, Muhammad bin Ismail al-. (1442 H.) *Shahih al-Bukhari*. Riset Muhammad Zuhair bin Nashir al-Nashir. Dar Thauq al-Najat.
- Dinawari, Ahmad bin Daud al-. *Al-Akhbar al-Thiwal*. Riset Abdul Mun'im Amir Murajaah Jamaluddin Sayyal. Qom: Mansyurat al-Radhi, 1368 HS.
- Dzahabi, Muhammad Husain al-. (1985) *Siyar A'lam al-Nubala'*. Riset Syaib Arnauth dkk. Kairo: Muassasah al-Risalah.
- Eliade, Mircea. (1987). *The Encyclopaedia of Religion*. New York: Macmillan.
- El Wa, Mohammed S. (1983) *Sistem Politik Dalam Pemerintahan Islam* (Judul Asli: *On The Political System of Islamic State*). Terj. Anshori Thayib. Surabaya: bina Ilmu.
- Enayat. Hamid. (1988). *Reaksi politik Sunni dan Syi'ah: Pemikiran politik Islam Modern Menghadapi Abad ke-20* (Judul Asli: *Modern Islamic Thought. The Response of the Syi'i and Sunni Muslims to the Twentieth Century*). terj. Asep Hikmat. Bandung: Pustaka.
- Fakhry, Majid. (1970). *A History of Islamic Philosophy*. New York & London: Columbia University Press.
- Fakhry, Majid. (1977), *Sejarah Filsafat Islam*, terj. R. Mulyadhi Kartanegara, Jakarta: Pustaka Jaya.



- Fârûqî, Al-Fârûqî, Isma'îl R., and Lois Lamyâ' al-. (1986). *The Cultural Atlas of Islam*, New York: Macmillan Publishing Company.
- Goldziher, Ignaz. (1981). *Introduction to Islamic Theology and Law*. New Jersey: Princeton University Press.
- Hakiki, Kiki Muhamad. (2012). "Mengkaji Ulang Sejarah Politik Kekuasaan Abbasiyah". *Jurnal TAPIS*, 9(1): 113-134.
- Hanbal, Abu 'Abd Allâh Ahmad Ibnu. (t.th.). *Musnad Ahmad ibn Hanbal, Juz I*, Beirut: Dâr al-Fikri.
- Hardjapamekas, RS. (1993). *Vademecum*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Hisyam, Abdulmalik Ibnu. (t.th.) *Al-Sirah al-Nabawiyah*. Riset Musthafa Saqqa dkk. Beirut: Dâr Ihyâ' al-Turâts al-'Arabi.
- Hughes, Thomas Patrick (1982) *Dictionary of Islam*, New Delhi: Cosmo Publication.
- Isfahani. Abul Faraj. (t.th.) *Maqatil al-Thalibiyin*. Riset Ahmad Shaqr. Beirut: Dâr al-Ma'rifat.
- Karim, M. Abdul (2015). *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*. Yogyakarta: Bagaskara.